

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Veteran No. 70 Eks. Lap. Poliko
Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279
Payakumbuh



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dinas pendidikan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - f. badan penanggulangan bencana daerah;
 - g. dinas sosial;
 - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas ketahanan pangan;
 - k. dinas lingkungan hidup;
 - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. dinas perhubungan;
 - n. dinas komunikasi dan informatika;
 - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - s. dinas pertanian;
 - t. sekretariat daerah;
 - u. sekretariat dprd;
 - v. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - w. badan keuangan daerah;
 - x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - y. inspektorat;
 - z. kecamatan payakumbuh utara;
 - aa. kecamatan payakumbuh barat;
 - bb. kecamatan payakumbuh timur;
 - cc. kecamatan payakumbuh selatan;
 - dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan
 - ee. kantor kesbangpol.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila dalam pelaksanaan RKPD mengalami perubahan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Agustus 2024



Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,

SUPRAYITNO

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 13

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR TABEL..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | I-3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | I-6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | I-6 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023..... | II-1 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah..... | II-1 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | II-12 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah..... | II-20 |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025..... | II-29 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | II-36 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | III-1 |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... | III-2 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah..... | III-2 |
| 3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan..... | III-2 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | IV-1 |
| BAB V PENUTUP..... | V-1 |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|------------|---|---|-------|
| Tabel 2. 1 | : | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Payakumbuh..... | II-2 |
| Tabel 2.2 | : | Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023..... | II-8 |
| Tabel 2.3 | : | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | II-19 |
| Tabel 2.4 | : | Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025..... | II-30 |
| Tabel 2.5 | : | Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025..... | II-39 |
| Tabel 2.6 | : | Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025..... | II-40 |
| Tabel 3.1 | : | Interkoneksi Prioritas Daerah Kota Payakumbuh dengan Prioritas Nasional..... | III-1 |
| Tabel 3.2 | : | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024 Sumber Dana APBD Kota Payakumbuh. | III-6 |
| Tabel 4.1 | : | Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025..... | IV-2 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/ Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun ke-tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Payakumbuh, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kota Payakumbuh serta berdasarkan pertimbangan terhadap hasil evaluasi akhir periode RPJMD tahun 2017-2022, dokumen ini juga dijadikan sebagai instrumen dalam mewujudkan muatan-muatan yang terkandung pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Perencanaan dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya, tepat waktu penyelesaiannya dan menyeimbangkan asas bottom up dan top down.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya RKPD Tahun 2025, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan dan sasaran prioritas serta dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
- c. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Satuan Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja. Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2025, terdapat dua peristiwa besar berskala nasional dan global yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024, adalah tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang secara langsung akan berdampak pada perkembangan perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Kota Payakumbuh.

Sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, maka dari peristiwa besar berskala global pada tahun 2024 diatas, Sekretariat Daerah juga ikut andil baik secara langsung maupun tak langsung dalam agenda tersebut. Bentuk keterlibatan Sekteraiat Daerah antara lain adalah membantu Pimpinan dalam penyusunan kebijakan, evaluasi dan pemantauan kelancaran jalannya Pemilu Tahun 2024 serta pengentasan Kemiskinan Ekstrim dan *Stunting* karena tantangan ekonomi global yang berdampak pada perekonomian daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 62)
22. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);

23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 6);
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh adalah :

1. Memberikan fokus kerja organisasi dan pelayanan yang lebih diarahkan pada mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode 1 (satu) tahun anggaran.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah adalah :

1. Mewujudkan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat Daerah;
3. Meningkatkan pelayanan Masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

- 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023 berguna untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Daerah apakah sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dan menjadi pertimbangan untuk pelaksanaannya pada tahun berikutnya serta kemungkinan adanya kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan dilapangan.

Evaluasi rencana kerja difokuskan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Terhadap capaian program yang berkaitan dengan target dari program yang tercantum pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 sudah sesuai dengan target capaian program pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu :

1. Nilai IKM, target 88,41 terealisasi 89,65 dengan capaian sebesar 101%
2. Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, target A terealisasi dengan nilai B dengan capaian sebesar 86,25%

Sebagian besar sudah ditindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat terhadap evaluasi dari dokumen LkjIP Sekretariat Daerah.

3. Nilai LPPD, target 3,1700 terealisasi sebesar 3,3922 dengan capaian 107,01%
4. Indeks Reformasi Hukum, target 75 terealisasi sebesar 67,48 dengan capaian sebesar 89,97%.

Perlu dipelajari lebih lanjut terkait instrumen penilaian terhadap indeks reformasi hukum.

5. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, target 75 terealisasi sebesar 83,26 dengan capaian 111%

Adapun untuk lebih jelasnya terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

| SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|----------------|----------------|---|----------------|--|----------------|--|----------------|----------|----------|-----------|---|--|
| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra) | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 | | Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n) | | | | | Capaian Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | |
| | | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 8/6 | 11 = 9/7 | 12 | 13 = 12/4 | |
| | | | unit | satuan | Rp | unit | Rp | K unit | Rp | K unit | Rp | | | K unit | Rp | |
| | Urusan Pendukung Kesekretariatan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sekretariat Daerah | | | 20.452.563.087 | | 26.130.693.900 | | 28.767.352.316 | | 26.386.177.187 | | 91,72% | | | | |
| | | Nilai LPPD | 3,170 | Nilai | 20.452.563.087 | | 26.130.693.900 | 3,1700 | 28.767.352.316 | 3,3922 | 26.386.177.187 | | 91,72% | 3,3922 | | |
| | | Nilai IKM | 88,41 | Nilai | | | | 88,41 | | 89,65 | | | | 89,65 | 101% | |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Nilai IKM | 88,41 | Nilai | 20.450.763.087 | 12,39 | 21.647.429.204 | 88,41 | 22.833.556.026 | 89,65 | 20.790.939.403 | 101% | 91,05% | 89,65 | 101% | |
| | | Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat | A | Nilai | | A | | A | | B | | | | B | | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian kinerja program/ kegiatan | 100 | persen | 200.000 | 90 | 118.578.660 | 100 | 134.863.150 | 100 | 125.364.880 | 100% | 92,96% | 100 | 100% | |
| | | IKM Sekretariat Daerah | 87 | Nilai | | 89,98 | | 87 | | 89,91 | | 103% | | 89,91 | 103% | |
| 1) | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 | dokumen | 100.000 | 6 | 48.564.990 | 4 | 58.464.600 | 4 | 56.852.220 | 100% | 97,24% | 4 | 100% | |
| 2) | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | laporan | 100.000 | 4 | 70.013.670 | 4 | 76.398.550 | 4 | 68.512.660 | 100% | 89,68% | 4 | 100% | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | 90 | persen | 10.467.318.417 | 100 | 9.465.948.045 | 90 | 10.185.492.269 | 50 | 9.179.430.317 | 56% | 90,12% | 50 | 56% | |
| 1) | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 84 | orang/bulan | 9.907.318.417 | 84 | 9.465.948.045 | 84 | 9.625.323.269 | 77 | 8.655.803.397 | 92% | 89,93% | 77 | 92% | |
| 2) | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 12 | laporan | 560.000.000 | | | 12 | 560.169.000 | 12 | 523.626.920 | 100% | 93,48% | 12 | 100% | |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | 100 | persen | 50.000.000 | 1502 | 49.817.860 | 100 | 50.000.000 | 100 | 49.905.300 | 100% | 99,81% | 100 | 100% | |
| 1) | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 | dokumen | 50.000.000 | 9 | 49.817.860 | 1 | 50.000.000 | 1 | 49.905.300 | 100% | 99,81% | 1 | 100% | |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 | persen | 100.000 | 100 | 42.930.000 | 100 | 50.475.400 | 100 | 41.385.240 | 100% | 81,99% | 100 | 100% | |
| 1) | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 | paket | 100.000 | 81 | 42.930.000 | 1 | 50.475.400 | 0 | 41.385.240 | 0% | 81,99% | 0 | 0% | |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar | 100 | persen | 1.474.600.230 | 90 | 3.062.782.125 | 100 | 3.229.685.900 | 100 | 3.071.845.678 | 100% | 95,11% | 100 | 100% | |
| 1) | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | paket | 43.378.760 | 9 | 43.076.390 | 1 | 47.505.800 | 1 | 47.498.010 | 100% | 99,98% | 1 | 100% | |
| 2) | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 | paket | 36.054.350 | 21 | 225.297.930 | 1 | 458.697.220 | 1 | 442.620.000 | 100% | 96,50% | 1 | 100% | |
| 3) | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 1 | paket | 34.352.170 | 49 | 34.316.750 | 1 | 34.251.700 | 1 | 34.170.250 | 100% | 99,76% | 1 | 100% | |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra) | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaran Kegiatan s/d tahun 2022 | | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 | | Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n) | | | | Capaian Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----|--|--|--|---------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | Realisasi Kinerja Renja | | Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) | | Realisasi Target Kinerja | Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) |
| | | | unit | satuan | | unit | | unit | | Rp | Rp | 10 = 8/6 | 11 = 9/7 | K unit | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 8/6 | 11 = 9/7 | 12 | 13 = 12/4 |
| 4) | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 1 | paket | 60.714.950 | 13 | 60.557.880 | 1 | 60.702.160 | 1 | 60.657.810 | 100% | 99,93% | 1 | 100% |
| 5) | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 3 | dokumen | 100.000 | 21 | 336.914.550 | 3 | 424.139.500 | 3 | 347.754.850 | 100% | 81,99% | 3 | 100% |
| 6) | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | laporan | 550.000.000 | 100 | 1.129.444.600 | 1 | 931.861.520 | 1 | 881.713.506 | 100% | 94,62% | 1 | 100% |
| 7) | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 144 | laporan | 750.000.000 | 355 | 1.233.174.025 | 144 | 1.272.528.000 | 138 | 1.257.431.252 | 96% | 98,81% | 138 | 96% |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor | 90 | persen | 50.400.000 | 90 | 247.273.500 | 90 | 518.738.864 | 90 | 509.053.500 | 100% | 98,13% | 90 | 100% |
| 1) | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | | unit | | | | | | | | | | 0 | |
| 2) | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 | unit | 100.000 | | | | | | | | | 0 | 0% |
| 3) | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 | unit | 100.000 | 50 | 67.000.000 | | | | | | | 0 | 0% |
| 4) | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 | unit | 50.000.000 | | | 63 | 328.500.900 | 63 | 327.120.000 | | | 63 | 2100% |
| 5) | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 | unit | 100.000 | 1 | 180.273.500 | 2 | 132.070.924 | 2 | 130.429.500 | 100% | 98,76% | 2 | 100% |
| 6) | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 | unit | 100.000 | | | 3 | 58.167.040 | 3 | 51.504.000 | 100% | 88,54% | 3 | 100% |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan | 98 | persen | 3.328.702.003 | 90 | 2.802.826.807 | 90 | 2.983.032.853 | 90 | 2.799.152.685 | 100% | 93,84% | 90 | 92% |
| 1) | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | laporan | 19.998.000 | 1590 | 18.100.000 | 12 | 19.996.250 | 12 | 19.571.000 | 100% | 97,87% | 12 | 1200% |
| 2) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | laporan | 959.540.000 | 4 | 802.114.382 | 12 | 989.526.052 | 12 | 943.880.686 | 100% | 95,39% | 12 | 1200% |
| 3) | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | laporan | 170.495.794 | 100% | 329.489.005 | 1 | 307.726.700 | 1 | 277.222.126 | 100% | 90,09% | 1 | 100% |
| 4) | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan | 1 | laporan | 2.178.668.209 | 12 | 1.653.123.420 | 12 | 1.665.783.851 | 12 | 1.558.478.873 | 100% | 93,56% | 12 | 1200% |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | 90 | persen | 1.199.040.000 | 90 | 1.343.188.373 | 90 | 1.333.355.060 | 90 | 1.285.068.364 | 100% | 96,38% | 90 | 100% |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra) | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaran Kegiatan s/d tahun 2022 | | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 | | Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n) | | | | Capaian Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----|--|--|--|---------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|---------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|
| | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | Realisasi Kinerja Renja | | Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) | | Realisasi Target Kinerja | Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) |
| | | | unit | satuan | | unit | | unit | | unit | Rp | Rp | 10 = 8/6 | 11 = 9/7 | K unit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 8/6 | 11 = 9/7 | 12 | 13 = 12/4 |
| 1) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 15 | unit | 601.400.000 | 15 | 601.392.039 | 13 | 478.410.000 | 13 | 478.391.475 | 100% | 100,00% | 13 | 87% |
| 2) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 45 | unit | 397.650.000 | 45 | 448.108.493 | 45 | 483.450.000 | 52 | 457.418.685 | 116% | 94,62% | 52 | 116% |
| 3) | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 | unit | 5.400.000 | 3 | 29.446.000 | 10 | 40.000.000 | 10 | 39.622.000 | 100% | 99,06% | 10 | 100% |
| 4) | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 | unit | 19.490.000 | 10 | 19.307.375 | 10 | 19.490.000 | 10 | 19.456.000 | 100% | 99,83% | 10 | 100% |
| 5) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 | unit | 100.000 | 3 | 179.616.866 | 4 | 147.075.060 | 4 | 128.093.764 | 100% | 87,09% | 4 | 100% |
| 6) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 | unit | 25.000.000 | 3 | 9.978.900 | 4 | 25.000.000 | 4 | 24.057.280 | 100% | 96,23% | 4 | 100% |
| 7) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 | unit | 150.000.000 | 42 | 55.338.700 | 4 | 139.930.000 | 4 | 138.029.160 | 100% | 98,64% | 4 | 100% |
| 9 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH | 100 | persen | 655.950.747 | 100 | 603.758.738 | 100 | 500.031.520 | 100 | 479.158.000 | 100% | 95,83% | 100 | 100% |
| 1) | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 | orang/bulan | 182.469.807 | 9 | 135.964.978 | 1 | 11.340.000 | 1 | 8.090.000 | 100% | | 1 | 50% |
| 2) | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 | paket | 68.480.940 | 18 | 80.793.760 | 1 | 86.191.520 | 1 | 85.818.000 | 100% | 99,57% | 1 | 50% |
| 3) | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4 | orang | 5.000.000 | | | 2 | 2.500.000 | | - | 0% | 0,00% | 0 | 0% |
| 4) | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 | orang/bulan | 400.000.000 | 100 | 387.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 385.250.000 | 100% | 96,31% | 1 | 50% |
| 10 | Fasilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah | Persentase pelayanan kerumahantagaan Sekretariat Daerah dengan baik | 100 | persen | 605.947.020 | 100 | 805.919.131 | 100 | 635.358.910 | 100 | 408.408.957 | 100% | 64,28% | 100 | 100% |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 1 | paket | 532.329.900 | 100 | 572.183.201 | 1 | 540.461.280 | 1 | 328.076.143 | 100% | 60,70% | 1 | 100% |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 1 | paket | 100.000 | 100 | 151.031.010 | | - | | | | | 0 | 0% |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra) | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaran Kegiatan s/d tahun 2022 | | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 | | Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n) | | | | Capaian Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----|---|---|--|---------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|----------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 10 = 8/6 | 11 = 9/7 | Realisasi Target Kinerja | Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) |
| | | | unit | satuan | | unit | | unit | | unit | | | | unit | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 1 | paket | 73.517.120 | 100 | 82.704.920 | 1 | 94.897.630 | 1 | 80.332.814 | 100% | 84,65% | 1 | 100% |
| 11 | Penataan Organisasi | Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah | 39,09 | indeks | 300.000 | 39,09 | 512.984.330 | 39,09 | 569.426.250 | 39,09 | 564.333.868 | 100% | 99,11% | 39,09 | 100% |
| 1) | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 1 | dokumen | 100.000 | 2 | 165.028.750 | 1 | 263.429.300 | 1 | 262.376.028 | 100% | 99,60% | 1 | 100% |
| 2) | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 | laporan | 100.000 | 1 | 190.391.960 | 1 | 186.343.700 | 1 | 184.780.310 | 100% | 99,16% | 1 | 100% |
| 3) | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 2 | dokumen | 100.000 | 2 | 157.563.620 | 2 | 119.653.250 | 2 | 117.177.530 | 100% | 97,93% | 2 | 100% |
| 12 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik | 100 | persen | 2.618.204.670 | 100 | 2.591.421.635 | 100 | 2.643.095.850 | 100 | 2.277.832.614 | 100% | 86,18% | 100 | 100% |
| 1) | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 12 | laporan | 164.996.590 | 24 | 157.259.200 | 12 | 138.155.710 | 12 | 106.804.500 | 100% | 77,31% | 12 | 100% |
| 2) | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 | laporan | 2.172.708.080 | 90 | 2.164.572.435 | 12 | 2.172.704.250 | 12 | 1.867.811.674 | 100% | 85,97% | 12 | 100% |
| 3) | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 12 | laporan | 280.500.000 | 316 | 269.590.000 | 12 | 332.235.890 | 12 | 303.216.440 | 100% | 91,27% | 12 | 100% |
| II | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Nilai LPPD | 3,170 | Nilai | 1.100.000 | 80 | 3.945.226.370 | 3,1700 | 5.365.753.600 | 3,3922 | 5.069.196.067 | | 94,47% | 3,3922 | |
| | | Indeks Reformasi Hukum | 75 | indeks | | | | 72 | | 67,48 | - | | | 67,48 | |
| 1 | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik | 100 | persen | 300.000 | 100 | 1.003.406.430 | 100 | 1.444.527.230 | 100 | 1.402.290.518 | 100% | 97,08% | 100 | 100% |
| | | Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu | 100 | persen | | 100 | | 100 | | 100 | - | 100% | | 100 | 100% |
| 1) | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 1 | dokumen | 100.000 | 1 | 349.418.459 | 1 | 666.696.850 | 1 | 642.794.773 | 100% | 96,41% | 1 | 100% |
| 2) | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1 | dokumen | 100.000 | 2 | 200.434.831 | 1 | 351.741.680 | 1 | 350.469.795 | 100% | 99,64% | 1 | 100% |
| 3) | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 1 | dokumen | 100.000 | 5 | 453.553.140 | 1 | 426.088.700 | 1 | 409.025.950 | 100% | 96,00% | 1 | 100% |
| 2 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat | 100 | persen | 300.000 | 80 | 2.317.556.720 | 100 | 3.335.574.730 | 100 | 3.226.869.799 | 100% | 96,74% | 100 | 100% |
| 1) | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 | dokumen | 100.000 | 12 | 506.116.200 | 1 | 956.318.390 | 1 | 899.319.030 | 100% | 94,04% | 1 | 100% |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra) | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaran Kegiatan s/d tahun 2022 | | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 | | Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n) | | | | Capaian Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----|---|---|--|---------|---------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | Realisasi Kinerja Renja | | Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) | | Realisasi Target Kinerja | Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) |
| | | | unit | satuan | | unit | | unit | | unit | Rp | Rp | 10 = 8/6 | 11 = 9/7 | K unit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 8/6 | 11 = 9/7 | 12 | 13 = 12/4 |
| 2) | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 1 | dokumen | 100.000 | 1 | 1.638.904.400 | 1 | 2.138.554.700 | 1 | 2.102.759.364 | 100% | 98,33% | 1 | 100% |
| 3) | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 1 | dokumen | 100.000 | 2 | 172.536.120 | 1 | 240.701.640 | 1 | 224.791.405 | 100% | 93,39% | 1 | 100% |
| 3 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi | 100 | persen | 300.000 | 100 | 437.608.860 | 100 | 408.063.970 | 100 | 281.177.770 | 100% | 68,91% | 100 | 100% |
| | | Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi | 100 | persen | | 100 | | 100 | | 100 | - | 100% | | 100 | 100% |
| 1) | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 3 | dokumen | 100.000 | 2 | 104.363.920 | 3 | 93.359.170 | 3 | 86.241.900 | 100% | 92,38% | 3 | 100% |
| 2) | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 2 | kasus | 100.000 | 8 | 246.839.460 | 2 | 255.253.250 | 2 | 136.235.400 | 100% | 53,37% | 2 | 100% |
| 3) | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah produk hukum dan pengelolaan produk hukum yang didokumentasikan | 3 | dokumen | 100.000 | 100 | 86.405.480 | 3 | 59.451.550 | 3 | 58.700.470 | 100% | 98,74% | 3 | 100% |
| 4 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi | 5 | MoU/PKS | 200.000 | 100 | 186.654.360 | 5 | 177.587.670 | 5 | 158.857.980 | 100% | 89,45% | 5 | 100% |
| 1) | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 1 | dokumen | 100.000 | 10 | 179.745.730 | 1 | 170.633.320 | 1 | 152.214.980 | 100% | 89,21% | 1 | 100% |
| 2) | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 | laporan | 100.000 | 1 | 6.908.630 | 1 | 6.954.350 | 1 | 6.643.000 | 100% | 95,52% | 1 | 100% |
| III | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 75 | | 700.000 | 75 | 538.038.326 | 75 | 568.042.690 | 83,26 | 526.041.717 | 111% | 92,61% | 83,26 | 111% |
| 1 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti | 100 | persen | 200.000 | 80 | 169.130.784 | 100 | 195.719.000 | 100 | 177.753.327 | 100% | 90,82% | 100 | 100% |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja Renstra sampai Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra) | | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaran Kegiatan s/d tahun 2022 | | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 | | Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (tahun n) | | | | Capaian Target Kinerja Renstra s/d Tahun 2023 | |
|-----|---|---|--|---------|---------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|---------------------------------------|----------|---|---------------------------------------|
| | | | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | Realisasi Kinerja Renja | | Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) | | Realisasi Target Kinerja | Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) |
| | | | unit | satuan | | unit | | unit | | unit | Rp | Rp | 10 = 8/6 | 11 = 9/7 | K unit |
| 1) | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 1 | dokumen | 100.000 | 6 | 74.807.914 | 1 | 79.999.600 | 1 | 78.866.870 | 100% | 98,58% | 1 | 100% |
| 2) | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 1 | laporan | 100.000 | 18 | 94.322.870 | 1 | 115.719.400 | 1 | 98.886.457 | 100% | 85,45% | 1 | 100% |
| 2 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti | 100 | persen | 100.000 | 93 | 57.631.150 | 100 | 62.563.940 | 100 | 59.574.550 | 100% | 95,22% | 100 | 100% |
| 1) | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 12 | laporan | 100.000 | 12 | 57.631.150 | 12 | 62.563.940 | 12 | 59.574.550 | 100% | 95,22% | 12 | 100% |
| 3 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik | 100 | persen | 300.000 | 100 | 303.225.072 | 100 | 299.760.500 | 100 | 279.212.400 | 100% | 93,15% | 100 | 100% |
| | | Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan | 4 | kali | | 100 | | 4 | | 4 | - | 100% | | 4 | 100% |
| 1) | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | dokumen | 100.000 | 100 | 106.933.700 | 1 | 26.311.700 | | 24.344.500 | 0% | 92,52% | 0 | 0% |
| 2) | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 1 | dokumen | 100.000 | 100 | 155.207.872 | 1 | 150.888.600 | 1 | 135.840.900 | 100% | 90,03% | 1 | 100% |
| 3) | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 40 | orang | 100.000 | 8 | 41.083.500 | 40 | 122.560.200 | 40 | 119.027.000 | 100% | 97,12% | 40 | 100% |
| 4 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun | 1 | dokumen | 100.000 | 4 | 8.051.320 | 1 | 9.999.250 | 1 | 9.501.440 | 100% | 95,02% | 1 | 100% |
| 1) | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 1 | dokumen | 100.000 | 4 | 8.051.320 | 1 | 9.999.250 | 1 | 9.501.440 | 100% | 95,02% | 1 | 100% |

Tabel 2.2
Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2023

| NO. | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Keuangan | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 22.833.556.026 | 20.790.939.403 | 91,05% |
| I | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 134.863.150 | 125.364.880 | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 58.464.600 | 56.852.220 | 97,24% |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 76.398.550 | 68.512.660 | 89,68% |
| II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.185.492.269 | 9.179.430.317 | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.625.323.269 | 8.655.803.397 | 89,93% |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 560.169.000 | 523.626.920 | 93,48% |
| III | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 50.000.000 | 49.905.300 | |
| 1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 50.000.000 | 49.905.300 | 99,81% |
| IV | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 50.475.400 | 41.385.240 | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 50.475.400 | 41.385.240 | 81,99% |
| V | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3.229.685.900 | 3.071.845.678 | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 47.505.800 | 47.498.010 | 99,98% |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 458.697.220 | 442.620.000 | 96,50% |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 34.251.700 | 34.170.250 | 99,76% |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 60.702.160 | 60.657.810 | 99,93% |
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 424.139.500 | 347.754.850 | 81,99% |
| 6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 931.861.520 | 881.713.506 | 94,62% |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.272.528.000 | 1.257.431.252 | 98,81% |
| VI | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 518.738.864 | 509.053.500 | |
| 1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 328.500.900 | 327.120.000 | 99,58% |

| NO. | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Keuangan | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 132.070.924 | 130.429.500 | 98,76% |
| 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 58.167.040 | 51.504.000 | 88,54% |
| VII | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.983.032.853 | 2.799.152.685 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 19.996.250 | 19.571.000 | 97,87% |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 989.526.052 | 943.880.686 | 95,39% |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 307.726.700 | 277.222.126 | 90,09% |
| 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.665.783.851 | 1.558.478.873 | 93,56% |
| VIII | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.333.355.060 | 1.285.068.364 | |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 478.410.000 | 478.391.475 | 100,00% |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 483.450.000 | 457.418.685 | 94,62% |
| 3 | Pemeliharaan Mebel | 40.000.000 | 39.622.000 | 99,06% |
| 4 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.490.000 | 19.456.000 | 99,83% |
| 5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 147.075.060 | 128.093.764 | 87,09% |
| 6 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000 | 24.057.280 | 96,23% |
| 7 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 139.930.000 | 138.029.160 | 98,64% |
| IX | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 500.031.520 | 479.158.000 | |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 11.340.000 | 8.090.000 | 71,34% |
| 2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 86.191.520 | 85.818.000 | 99,57% |
| 3 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2.500.000 | - | 0,00% |

| NO. | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Keuangan | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian |
| 4 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 400.000.000 | 385.250.000 | 96,31% |
| X | Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah | 635.358.910 | 408.408.957 | |
| 1 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 540.461.280 | 328.076.143 | 60,70% |
| 2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 94.897.630 | 80.332.814 | 84,65% |
| XI | Penataan Organisasi | 569.426.250 | 564.333.868 | |
| 1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 263.429.300 | 262.376.028 | 99,60% |
| 2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 186.343.700 | 184.780.310 | 99,16% |
| 3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 119.653.250 | 117.177.530 | 97,93% |
| XII | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 2.643.095.850 | 2.277.832.614 | |
| 1 | Fasilitasi Keprotokolan | 138.155.710 | 106.804.500 | 77,31% |
| 2 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 2.172.704.250 | 1.867.811.674 | 85,97% |
| 3 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 332.235.890 | 303.216.440 | 91,27% |
| B | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 5.365.753.600 | 5.069.196.067 | 94,47% |
| I | Administrasi Tata Pemerintahan | 1.444.527.230 | 1.402.290.518 | |
| 1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 666.696.850 | 642.794.773 | 96,41% |
| 2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 351.741.680 | 350.469.795 | 99,64% |
| 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 426.088.700 | 409.025.950 | 96,00% |
| II | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 3.335.574.730 | 3.226.869.799 | |
| 1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 956.318.390 | 899.319.030 | 94,04% |
| 2 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 2.138.554.700 | 2.102.759.364 | 98,33% |
| 3 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 240.701.640 | 224.791.405 | 93,39% |
| III | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 408.063.970 | 281.177.770 | |
| 1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 93.359.170 | 86.241.900 | 92,38% |

| NO. | Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Keuangan | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian |
| 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 255.253.250 | 136.235.400 | 53,37% |
| 3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 59.451.550 | 58.700.470 | 98,74% |
| IV | Fasilitasi Kerjasama Daerah | 177.587.670 | 158.857.980 | |
| 1 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 170.633.320 | 152.214.980 | 89,21% |
| 2 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 6.954.350 | 6.643.000 | 95,52% |
| C | Program Perekonomian Dan Pembangunan | 568.042.690 | 526.041.717 | 92,61% |
| I | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 195.719.000 | 177.753.327 | |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 79.999.600 | 78.866.870 | 98,58% |
| 2 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 115.719.400 | 98.886.457 | 85,45% |
| II | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 62.563.940 | 59.574.550 | |
| 1 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 62.563.940 | 59.574.550 | 95,22% |
| III | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 299.760.500 | 279.212.400 | |
| 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 26.311.700 | 24.344.500 | 92,52% |
| 2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | 150.888.600 | 135.840.900 | 90,03% |
| 3 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 122.560.200 | 119.027.000 | 97,12% |
| IV | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 9.999.250 | 9.501.440 | |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 9.999.250 | 9.501.440 | 95,02% |
| JUMLAH | | 28.767.352.316 | 26.386.177.187 | 91,72 |

Tabel 2.1 dan tabel 2.2 diatas sudah dapat menggambarkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 20223 melaksanakan 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 28.767.352.316,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.386.177.187,- atau sebesar 91,72%. Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang realisasi dibawah 70% sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, realisasi anggaran 0% disebabkan karena Intensitas kegiatan pimpinan yang padat sehingga Medical Check Up tertunda.

- b. Fasilitasi Bantuan Hukum, realisasi anggaran 53,37% disebabkan karena biaya penyelesaian masalah hukum menyesuaikan dengan tahapan/ proses kasus/ perkara yang dihadapi oleh Pemko Payakumbuh.
- c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, realisasi anggaran 60,70% disebabkan karena efisiensi anggaran yaitu pengadaan gorden/ vitrase tidak dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah, dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

(1) Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- c. Asisten Administrasi Umum

(2) Masing-masing Asisten membawahi:

- A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 Bagian, terdiri dari:
 - 1. Bagian Pemerintahan membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Otonomi Daerah
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan Wilayah

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Pendidikan Pariwisata, Pemudaran Olahraga
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Kesejahteraan Sosial
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keagamaan dan Budaya
 3. Bagian Hukum, membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perundang-undangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi Hukum
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bantuan Hukum
- B. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi 3 bagian, terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Produksi Daerah
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Pengembangan Ekonomi Daerah
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah
 2. Bagian PBJ dan Pengendalian Pembangunan membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi LPSE
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Monitorng, evaluasi dan Pelaporan
 3. Bagian Perencanaan dan Anggaran membawahi 2 Sub Bagian, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan
- C. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 Bagian, terdiri dari :
1. Bagian Organisasi membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Tata Laksana
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kepegawaian dan Kinerja
 2. Bagian Umum membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlengkapan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Rumah Tangga
- 3. Bagian Protokoler dan Dokumentasi membawahkan 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Protokoler
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Tata Usaha Pimpinan

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan daerah, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD)
- b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli dilingkungan Pemerintah Kota dan Kecamatan
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat
- e. Penyelenggaraan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan pendidikan, kesehatan, Sosial, Tramtibum dan Linmas, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan dan Penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga;
- h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. Kecamatan.

Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah.
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pendidikan, kesehatan, sosial, tramtibus dan linmas, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, keagamaan, kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum.
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tramtibus dan linmas, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, keagamaan, kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum.
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Transmigrasi, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan

Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- a. Dinas Ketahanan Pangan;
- b. Dinas Pertanian;
- c. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- d. Dinas Koperasi dan UKM;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas PU dan Penataan Ruang;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. Dinas Komunikasi dan Informasi;
- j. Dinas Lingkungan Hidup.

Fungsi Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategi Sekretariat Daerah
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Transmigrasi, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Transmigrasi, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4. Asisten Administrasi Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interen, pelayanan barang dan jasa serta urusan penunjang

keuangan, perencanaan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

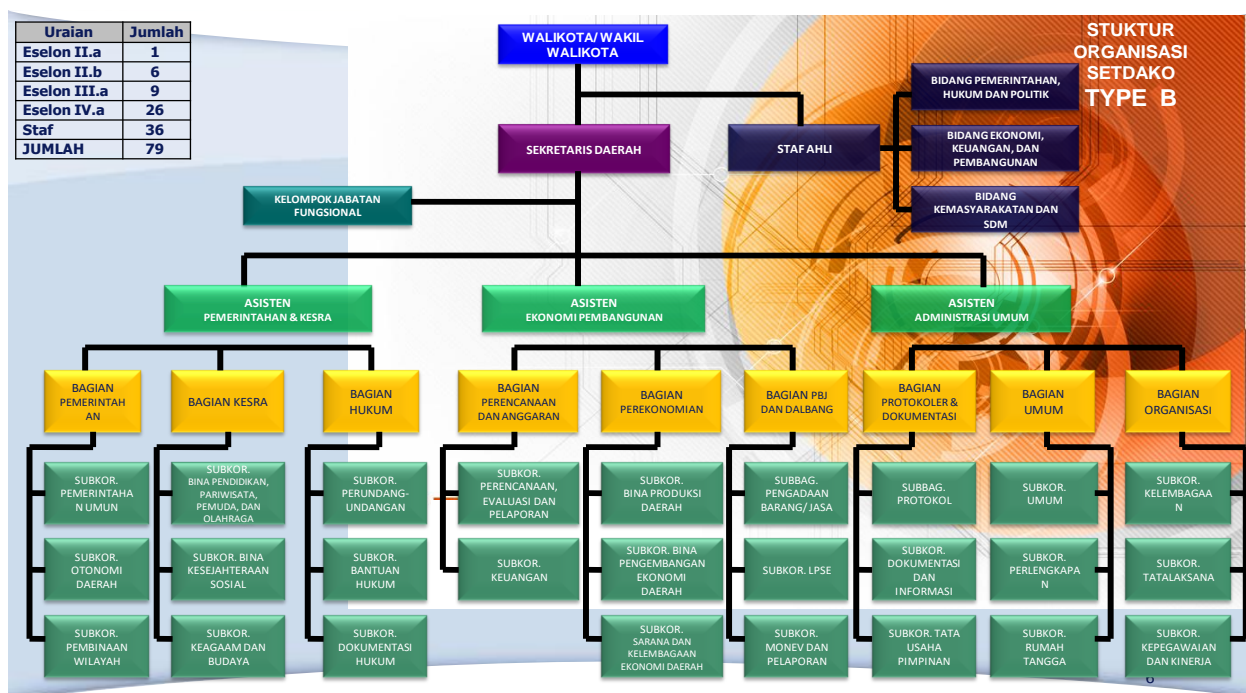
- a. Sekretariat DPRD;
- b. Inspektorat;
- c. BAPPEDA;
- d. Badan Keuangan Daerah;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Kantor KesbangPol

Fungsi Asisten Administrasi Umum sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum pada urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interen, pelayanan barang dan jasa serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah dilingkup tugasnya
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interen pelayanan barang dan jasa serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah dilingkup tugasnya
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan SOTK Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh



Berdasarkan penetapan kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh mempunyai indikator kinerja pelayanan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran Sekretariat Daerah yang ditargetkan ditahun 2023 secara umum telah tercapai, antara lain indikator yang tercapai melebihi target yang telah ditetapkan seperti Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai dengan indeks 89,65 dari 88,41 yang ditargetkan, dengan persentase sebesar 89,62%. Sedangkan nilai LPPD tahun 2023 dengan target sebesar 3,1700 tercapai dengan nilai 3,3922 berdasarkan atas Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Kepmendagri nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2022.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang perlu dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh adalah:

Bagian Pemerintahan:

1. Belum dilaksanakannya pemasangan pilar batas antara Kota Payakumbuh dengan Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Belum tergambar nya secara administrasi batas antar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Payakumbuh
3. Belum optimalnya kapasitas pemahaman aparatur pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan terutama dengan perubahan-perubahan aturan dan kebijakan tentang Kecamatan dan Kelurahan

4. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah umum di Kota Payakumbuh
5. Belum optimalnya inventarisasi data rupa bumi di Kota Payakumbuh
6. Belum optimalnya pemahaman SKPD terhadap indikator kinerja kunci (IKK) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Bagian Kesra:

1. Penguatan Peran Lembaga Keagamaan LPTQ dan MUI Kecamatan.

Secara umum lembaga keagamaan sudah berperan lebih baik, namun ada beberapa lembaga yang sebenarnya peran dan fungsinya sangat di harapkan dalam pembinaan keagamaan ditengah masyarakat, namun selama ini cenderung mengalami kefakuman dan kurang berperan, diantaranya LPTQ dan MUI Kecamatan. sehingga disaat penyelenggaraan MTQ kita sangat kesulitan mencari kafilah yang berkualitas dari lembaga-lembaga pendidikan Al Quran yang ada di Kota Payakumbuh. Begitupun MUI Kecamatan se Kota Payakumbuh, juga belum dirasakan perannya di tengah masyarakat sebagi wadah koordinasi ulama dalam pembinaan umat.

2. Peningkatan fungsi Masjid sebagai sarana pemberdayaan umat.

Dua tahun terakhir masjid-masjid yang ada di Kota Payakumbuh cenderung mengeliat, hal ini dilihat dari peningkatan jumlah jamaah shalat fardhu, namun mencermati potensi yang ada diharapkan kedepannya peran masjid tidak hanya sebagai sarana ibadah semata, tetapi diharapkan masjid bisa dijadikan sebagai salah satu pusat pemberdayaan kegiatan umat islam, dengan indicator minimal sebagai berikut:

- a. Masjid Sebagai Sarana Ibadah

Dilihat dari peningkatan jumlah jamaah shallat fardhu terutama subuh dan peningkatan kegiatan wirid pengajian rutin/tabigh akbar yang terprogram dan dikelola dengan baik.

- b. Masjid Sebagai Sarana Pendidikan

Kedepannya seluruh masjid di Kota Payakumbuh memiliki lembaga pendidikan keagamaan seperti TPQ dan MDTA bahkan kalau memungkinkan memiliki lembaga pendidikan formal seperti TK Islam dan SD Islam. Selain itu juga diharapkan setiap masjid memiliki perhatian terhadap keberadaan remaja masjid dan pendidikan Al Quran pasca khatam.

- c. Masjid Sebagai Sarana Penguatan Ekonomi Ummat.

Kedepannya masjid juga diharapkan memiliki program yang terstruktur dan dikelola dengan baik untuk pemberantasan kemiskinan dan pengayoman anak yatim/piatu yang tidak hanya bersifat insidental, melainkan berkesinambungan dan terarah. Untuk itu setiap masjid diharapkan memiliki unit pengelola zakat (UPZ) yang permanent, dengan struktur organisasi dan program kerja yang tertata dan tidak hanya focus pada pengelolaan Zakat Fitrah di bulan Ramadhan, melainkan juga Zakat Mal, Infaq, Sedekah dan Wakaf.

Bagian Hukum:

1. Masih adanya kasus-kasus yang terkait dengan Pemerintahan yang perlu dilakukan advokasi dan sosialisasi.
2. Koordinasi antara sesama Lembaga Penegak Hukum seperti Kejaksaan Negeri, Kepolisian, dan Lembaga Pengadilan dengan Pemerintah Kota Payakumbuh khususnya Bagian Hukum sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Sedangkan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum dan perlu penguatan koordinasi agar lebih optimal dan dicarikan solusinya secara komprehensif bersama stakeholder terkait. Koordinasi antara Lembaga Hukum dilakukan oleh Tim Advokasi yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.

Kurangnya koordinasi antara Lembaga disebabkan masih kurangnya kuantitas pertemuan Tim Advokasi yang disebabkan karena kurangnya dana pendukung untuk melakukan pertemuan tersebut. Disamping itu, anggota Tim Advokasi belum melakukan tugas pokok dan fungsi secara maksimal

3. Pembentukan Tim Pembahasan Ranperda
Tim yang bertugas membahas Perda sebelum dilimpahkan ke DPRD baik secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas, untuk itu perlu dilakukan peningkatan yang lebih komprehensif dengan jalan, melakukan fasilitasi pembahasan perda dengan pihak Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat dan Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat

4. Masalah Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan
Jika dilihat dari resiko terhadap kegiatan yang dilakukan tidak seimbang dengan dana yang tersedia. Namun kegiatan ini berdampak terhadap hukum/ timbul masalah hukum terutama terhadap Keputusan Walikota yang dikaji. Apalagi Keputusan yang diterbitkan secara umum untuk melaksanakan APBD. Kendala lain yang dihadapi pada kegiatan ini adalah adanya beberapa SKPD yang tidak berkoordinasi dengan Bagian Hukum

- untuk menandatangani Produk Hukum yang dibuat sehingga ketika persoalan muncul adakalanya bagian hukum tidak mengetahui
5. Masalah dokumentasi hukum, melalui jaringan dokumentasi informasi hukum, (JDIH) Bagian Hukum Kota Payakumbuh telah mendapat penghargaan dari Kemenkumham sebagai pengelola JDIH terintegrasi. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Untuk itu pada tahun-tahun mendatang perlu optimalisasi pelaksanaan dan pemanfaatan JDIH sebagai pusat informasi hukum melalui jaringan/ online yang dapat diperoleh oleh masyarakat atau SKPD setiap membutuhkan

Bagian Perekonomian:

1. Sering terjadinya kelangkaan BBM (Bensin,Solar,Pertamax) serta LPG 3 KG yang disebabkan oleh terganggunya pasokan dari PT. Pertamina, adanya spekulasi LPG 3 KG ditingkat pangkalan dan agen sehingga tidak tepat sasaran sampai ke konsumen
2. Dibidang Ketenagalistrikan masih banyaknya bangunan milik Pemerintah, Fasilitas Umum dan Milik Masyarakat yang instalasi listriknya sudah berusia diatas 15 tahun yang bisa berakibat menimbulkan kebakaran karena sudah tidak layak operasi.
3. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD sektor ekonomi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan bidang ekonomi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
4. Masih terbatasnya pemasaran hasil produk UMKM di Kota Payakumbuh, sehingga perkembangan kegiatan usaha sektor ini kurang memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kota Payakumbuh.
5. Rendahnya tingkat interaksi langsung antara pelaku usaha, pembeli dan pemerintah dalam memasarkan produk yang dihasilkan dan produk unggulan Kota Payakumbuh kurang dikenal.
6. Masih kurangnya informasi yang terpublikasi ke masyarakat tentang Perkembangan Produksi Daerah Sektor Ekonomi yang di Kota Payakumbuh.
7. Belum maksimalnya pengkajian dan analisa produksi daerah sektor ekonomi yang menghasilkan data valid sebagai dasar pembuatan kebijakan bidang ekonomi.
8. Mengendalikan harga pada level rendah dan stabil melalui berbagai kebijakan pengendalian inflasi
9. Perlu adanya data yang valid dan terintegrasi terutama data produksi dan data kebutuhan konsumsi di Kota Payakumbuh sehingga bisa diketahui

- ketersediaan pasokan yang digunakan dalam rangka merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang akan diambil
10. Perlu adanya kerjasama perdagangan antar daerah dalam rangka mencukupi pasokan pangan
 11. Interaksi dan Koordinasi dengan lembaga non pemerintah merupakan suatu yang sangat penting dalam mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir semua kepentingan masyarakat
 12. Perlu adanya suatu lembaga yang bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, salah satunya melalui pembentukan BUMD di Kota Payakumbuh
 13. Tujuan pembentukan BUMD bukan hanya *profit oriented* namun juga mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Pengendalian Pembangunan

1. Masih rendahnya kesadaran pengelola kegiatan terhadap tugas dan tanggung jawabnya
2. Masih rendahnya pemahaman pengelola kegiatan terhadap pelaksanaan tertib administrasi pembangunan dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
3. Dibutuhkan biaya operasional untuk pelaksanaan penyelenggaraan unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) agar pelaksanaan e-procurement di Kota Payakumbuh dapat berjalan optimal
4. Dibutuhkan biaya operasional untuk pelaksanaan penyelenggaraan unit pengelolaan pengadaan barang/jasa yang akan melaksanakan pengadaan barang/ jasa di Kota Payakumbuh
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pokja Unit Pengadaan Barang/ Jasa terkait peralihan status pokja menjadi fungsional tertentu dan perubahan peraturan tentang pengadaan.

Bagian Perencanaan dan Anggaran:

1. Belum optimalnya koordinasi masing-masing bagian dalam hal mengumpulkan bahan perencanaan, keuangan dan evaluasi dan pelaporan.
2. Rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya disebabkan minimnya diklat-diklat fungsional.
3. Kurangnya kuantitas sumber daya aparatur, berakibat kepada rangkap jabatan dan lambatnya penyelesaian tugas.

Bagian Organisasi :

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan kinerja, penetapan kinerja,

- pengukuran kinerja, hingga evaluasi kinerja yang dikarenakan perbedaan pemahaman dan persepsi diantara unsur pemerintah daerah dan belum terintegrasinya sistem aplikasi perencanaan, keuangan dan pelaporan
2. Ketersediaan sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi masih minim. Hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kapabilitas dan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan.
 3. Pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya masih belum optimal. Sehingga menyebabkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran SKPD tidak optimal.
 4. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan (SP), SOP di masing-masing Perangkat Daerah sehingga mempengaruhi nilai Survey Kepuasan Masyarakat
 5. Kelembagaan Perangkat Daerah yang ada saat ini masih belum optimal dalam mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, masih banyak tipe perangkat daerah yang tidak sesuai dengan beban tugas yang diemban, permasalahan kelembagaan rumah sakit yang masih menunggu Pepres, kelembagaan Kesbangpol yang belum jelas dan masalah terkait kelembagaan lainnya
 6. Belum optimalnya pelaksanaan Anjab, ABK dan Evjab sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar yang valid untuk manajemen kepegawaian mulai dari perencanaan pegawai, rekrutmen, manajemen karir, diklat, hingga penilaian dan pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi
 7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di Kota Payakumbuh.

Bagian Umum:

1. Aspek Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan hal penting seiring tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Pemerintah. Pelayanan yang diberikan bagian umum yakni persuratan beserta distribusinya, transportasi untuk kedinasan maupun masyarakat, pemakaian ruangan beserta fasilitasnya serta pelayanan pada rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah. Oleh sebab itu, Bagian Umum akan terus meningkatkan pelayanan untuk menunjang kinerja pemerintah

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Dari segi kualitas SDM yang tersedia tidak sebanding dengan beban tugas bagian umum yang cukup besar dan luasnya ruang lingkup pekerjaan.

Luasnya lingkup pekerjaan bagian umum menuntut tersedianya tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan atau skill khusus seperti teknisi maupun tenaga administrasi. Dari segi jumlah SDM yang dimiliki bagian umum masih kurang, yang mana pada kegiatan tertentu sering terjadi rangkap pekerjaan

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana maupun peralatan dan perlengkapan yang dikuasai bagian umum untuk kebutuhan kantor dan ruang dinas masih terbatas dari segi jumlah dan kualitas. Permasalahan juga muncul dari segi pemeliharaan sarana dan prasarana serta peralatan dan perlengkapan tersebut karena terbatasnya dana pendukung.

Bagian Protokoler dan Dokumentasi :

Ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dibidang protokoler masih minim. Hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kapabilitas dan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh yang berkaitan dengan pelayanan kepada Perangkat Daerah pada tatanan kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas tata kelola dan kelembagaan perangkat daerah.

Tata kelola dan kelembagaan perangkat daerah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, mesti memperbaiki kelembagaan masing-masing perangkat daerah terlebih dahulu.

Dengan adanya tuntutan dari pemerintah pusat untuk penyederhanaan birokrasi, maka pemerintah daerah harus siap untuk membenahi kelembagaan dan birokrasi dibawahnya sehingga akan tercipta tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas.

2. Belum optimalnya akuntabilitas dan kualitas pelaporan pemerintah daerah.

Kualitas pelaporan pemerintahan daerah yang belum optimal dikarenakan terdapatnya beberapa indikator-indikator pelaporan yang belum tercantum dalam dokumen perencanaan sehingga dalam masa pelaporan data yang dibutuhkan tidak dapat disajikan dalam dokumen pelaporan.

3. Belum optimalnya pelayanan hukum sesuai dengan kewenangan daerah. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengartikan sejauh mana peran dan kewenangan pemerintah daerah untuk masalah pelayanan hukum.
4. Belum optimalnya fasilitasi pengendalian inflasi daerah
Belum optimalnya pengambilan langkah-langkah kebijakan perekonomian untuk pengendalian laju inflasi daerah saat dan setelah Pandemi Covid-19.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum
Penyelenggaraan pemerintahan umum pada kecamatan dan kelurahan yang masih belum optimal sehingga perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah di atasnya karena kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan.
6. Belum optimalnya pelayanan publik perangkat daerah
Dengan perkembangan teknologi pada saat ini dan kedepannya perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pada kinerja pelayanan masing-masing perangkat daerah baik dari segi sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan.
7. Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Mekanisme pengadaan barang dan jasa sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dalam proses pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan baik dari proses awal perencanaan maupun pelaksanaan fisik pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Selain itu dengan adanya program pemerintah dalam pembagian proporsi pemakaian produksi dalam negeri sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyikapinya melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari awal proses pengadaan.
8. Belum optimalnya pengendalian administrasi pembangunan
Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam bidang pengendalian administrasi pembangunan, sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi terkait tertibnya pengendalian administrasi pembangunan
9. Belum optimalnya pengelolaan lembaga dan pengamalan agama
Perlunya dilakukan perbaikan terhadap kepengurusan dari lembaga keagamaan sehingga dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dapat dirasakan manfaatnya ditengah masyarakat.

10. Belum optimalnya kualitas pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Perlunya ditingkatkan kualitas pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kota Payakumbuh adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah;
3. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti oleh peraturan yang jelas.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Payakumbuh pada tahun 2023-2026 yang tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Oleh karena itu yang menjadi isu strategis Sekretariat Daerah dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2025 adalah “Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan”

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 ditemukan beberapa perbedaan dengan kebutuhan anggaran Sekretariat Daerah tahun 2025. Hal ini disebabkan karena terdapat kebutuhan mendasar antara lain :

1. Terkait dengan kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif seperti pengadaan kendaraan jabatan, kebutuhan rumah tangga KDH/ WKDH;
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Rumah Dinas KDH/ WKDH;
3. Penambahan anggaran untuk pemenuhan Hibah Masjid/ Musalla dan lembaga keagamaan lainnya.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan perubahannya dapat dilihat pada tabel 2.4. dibawah ini:

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPd TAHUN 2025
KOTA PAYAKUMBUH

| NO | RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2025 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----------|---|--------|--|-------------------|-----------------------|---|--------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Urusan Pendukung | | | | 25.661.526.737 | Urusan Pendukung | | | | 31.708.482.737 | |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | | Nilai IKM | 88,6 | 22.672.994.740 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | | Nilai IKM | 88,6 | 27.393.538.487 | |
| | | | Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat | A | | | | Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat | A | | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase capaian kinerja program/ kegiatan | 100% | 99.394.300 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase capaian kinerja program/ kegiatan | 100% | 99.394.050 | |
| | | | IKM Sekretariat Daerah | 89 | | | | IKM Sekretariat Daerah | 89 | | |
| | 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | 53.197.300 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | 16.812.300 | |
| | 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | 46.197.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | 82.581.750 | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | 90% | 11.167.197.096 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | 90% | 11.157.319.696 | |
| | 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 78 orang/bulan | 10.607.197.096 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 78 orang/bulan | 10.607.197.096 | |
| | 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 12 dokumen | 560.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 12 dokumen | 550.122.600 | |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | 100% | 20.000.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | 100% | 50.000.000 | |
| | 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 dokumen | 20.000.000 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 dokumen | 50.000.000 | |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | 52.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | 71.000.000 | |
| | 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 82 paket | 52.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 71 paket | 71.000.000 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|---|--------|---|-------------------|----------------------|---|--------|---|-------------------|----------------------|-----------------|
| | PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar | 100% | 2.173.003.700 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar | 100% | 2.797.540.200 | |
| 1) | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 9 paket | 34.988.750 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 9 paket | 34.985.000 | |
| 2) | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 5 paket | 15.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 5 paket | 99.996.000 | |
| 3) | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 20 paket | 30.225.450 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 20 paket | 69.743.000 | |
| 4) | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 3 paket | 39.448.050 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 3 paket | 39.448.050 | |
| 5) | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 3 dokumen | 424.136.100 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 3 dokumen | 424.123.150 | |
| 6) | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 laporan | 689.651.350 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 laporan | 889.697.000 | |
| 7) | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 144 laporan | 939.554.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 144 laporan | 1.239.548.000 | |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor | 90% | 345.200.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor | 90% | 3.394.721.963 | |
| 1) | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 unit | 100.000 | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 unit | 1.600.000.000 | |
| 2) | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 unit | 100.000 | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 unit | 1.350.000.000 | |
| 3) | Pengadaan Mebel | | Jumlah mebel yang diadakan | 6 paket | 100.000.000 | Pengadaan Mebel | | Jumlah mebel yang diadakan | 6 paket | 199.835.675 | |
| 4) | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 45.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 44.898.000 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----------|--|--------|--|-------------------|----------------------|--|--------|--|-------------------|----------------------|-----------------|
| | PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5) | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 100.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 99.998.388 | |
| 6) | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 100.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 99.989.900 | |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan | 100% | 2.813.527.050 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan | 100% | 2.965.786.014 | |
| 1) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 laporan | 941.040.850 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 laporan | 941.039.294 | |
| 2) | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 laporan | 199.997.200 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 laporan | 391.790.000 | |
| 3) | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan | 1 laporan | 1.672.489.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan | 1 laporan | 1.632.956.720 | |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | 90% | 1.028.970.424 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | 90% | 1.739.949.100 | |
| 1) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 15 unit | 478.410.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 15 unit | 612.180.000 | |
| 2) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 45 unit | 448.550.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 45 unit | 754.140.000 | |
| 3) | Pemeliharaan Mebel | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 unit | 10.000.000 | Pemeliharaan Mebel | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 unit | 9.977.500 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----------|--|--------|--|-------------------|----------------------|--|--------|--|-------------------|----------------------|-----------------|
| | PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4) | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 unit | 12.620.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 unit | 12.210.000 | |
| 5) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 unit | 29.990.424 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 unit | 233.721.600 | |
| 6) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 unit | 25.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 unit | 25.000.000 | |
| 7) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 unit | 24.400.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 unit | 92.720.000 | |
| 8 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH | 100% | 1.431.330.720 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH | 100% | 1.456.024.664 | |
| 1) | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 orang/bulan | 983.234.960 | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 orang/bulan | 984.905.144 | |
| 2) | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 5 paket | 43.095.760 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 5 paket | 66.119.520 | |
| 3) | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4 orang | 5.000.000 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4 orang | 5.000.000 | |
| 4) | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 orang/bulan | 400.000.000 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 orang/bulan | 400.000.000 | |
| 9 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | Persentase pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik | 100% | 771.348.850 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | Persentase pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik | 100% | 892.437.700 | |
| 1) | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 15 paket | 426.455.350 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 15 paket | 476.300.500 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----------|---|--------|--|-------------------|----------------------|--|--------|--|-------------------|----------------------|-----------------|
| | PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2) | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 15 paket | 250.000.000 | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 15 paket | 321.242.000 | |
| 3) | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 15 paket | 94.893.500 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 15 paket | 94.895.200 | |
| 10 | Penataan Organisasi | | Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah | 39,09% | 173.853.500 | Penataan Organisasi | | Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah | 39,09% | 173.853.150 | |
| 1) | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 1 dokumen | 74.300.800 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 1 dokumen | 74.300.700 | |
| 2) | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 laporan | 60.449.900 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 laporan | 60.449.700 | |
| 3) | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 2 dokumen | 39.102.800 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 2 dokumen | 39.102.750 | |
| 11 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik | 100% | 2.597.169.100 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik | 100% | 2.595.511.950 | |
| 1) | Fasilitasi Keprotokolan | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 12 laporan | 99.980.550 | Fasilitasi Keprotokolan | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 12 laporan | 99.980.050 | |
| 2) | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 laporan | 2.172.704.200 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 12 laporan | 2.171.064.900 | |
| 3) | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 12 laporan | 324.484.350 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 12 laporan | 324.467.000 | |
| II | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | | Nilai LPPD | 3.190 | 2.670.778.597 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | | Nilai LPPD | 3.190 | 3.987.838.900 | |
| | | | Indeks Reformasi Hukum | 74 | | | | Indeks Reformasi Hukum | 74 | | |
| 1 | Administrasi Tata Pemerintahan | | Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik | 100% | 651.059.300 | Administrasi Tata Pemerintahan | | Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik | 100% | 628.547.350 | |
| | | | Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu | 100% | | | | Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu | 100% | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----------|---|--------|---|-------------------|----------------------|---|--------|---|-------------------|----------------------|-----------------|
| | PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1) | Penataan Administrasi Pemerintahan | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 1 dokumen | 232.353.600 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 1 dokumen | 232.352.000 | |
| 2) | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1 dokumen | 63.888.950 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 1 dokumen | 63.888.750 | |
| 3) | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 5 dokumen | 354.816.750 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 5 dokumen | 332.306.600 | |
| 2 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat | 100% | 1.618.960.747 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat | 100% | 2.958.960.150 | |
| 1) | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 dokumen | 559.138.750 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 dokumen | 559.138.450 | |
| 2) | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 1 dokumen | 622.037.847 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 1 dokumen | 1.962.037.700 | |
| 3) | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 1 dokumen | 437.784.150 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 1 dokumen | 437.784.000 | |
| 3 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi | 100% | 387.758.700 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi | 100% | 387.432.000 | |
| | | | Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi | 100% | | | | Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi | 100% | | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|------------|---|--------|--|-------------------|--------------------|---|--------|--|-------------------|--------------------|-----------------|
| | PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1) | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 3 dokumen | 114.091.300 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 3 dokumen | 113.766.000 | |
| 2) | Fasilitasi Bantuan Hukum | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum | 2 kasus | 265.688.850 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum | 2 kasus | 265.688.000 | |
| 3) | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | Jumlah produk hukum dan pengelolaan produk hukum yang didokumentasikan | 3 dokumen | 7.978.550 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | Jumlah produk hukum dan pengelolaan produk hukum yang didokumentasikan | 3 dokumen | 7.978.000 | |
| 4 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | | Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi | 5 MoU/PKS | 12.999.850 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | | Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi | 5 MoU/PKS | 12.899.400 | |
| 1) | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri | 1 dokumen | 9.999.950 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri | 1 dokumen | 9.946.000 | |
| 2) | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 laporan | 2.999.900 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 laporan | 2.953.400 | |
| III | Program Perekonomian Dan Pembangunan | | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 77 | 317.753.400 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 77 | 327.105.350 | |
| 1 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti | 100% | 97.032.700 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti | 100% | 97.032.150 | |
| 1) | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 1 dokumen | 32.499.300 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 1 dokumen | 32.499.000 | |
| 2) | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 1 laporan | 64.533.400 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 1 laporan | 64.533.150 | |
| 2 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti | 100% | 18.603.650 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti | 100% | 18.603.350 | |
| 1) | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 12 laporan | 18.603.650 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 12 laporan | 18.603.350 | |

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|----|---|--------|--|-------------------|--------------------|---|--------|--|-------------------|--------------------|-----------------|
| | PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik | 100% | 198.617.550 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik | 100% | 198.616.750 | |
| | | | Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan | 4 kali | | | | Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan | 4 kali | | |
| 1) | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 dokumen | 26.246.150 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 dokumen | 26.245.900 | |
| 2) | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 1 dokumen | 150.888.450 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 1 dokumen | 150.888.000 | |
| 3) | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 40 orang | 21.482.950 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 40 orang | 21.482.850 | |
| 4 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun | 1 dokumen | 3.499.500 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun | 1 dokumen | 12.853.100 | |
| 1) | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian | 1 dokumen | 3.499.500 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian | 1 dokumen | 12.853.100 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah merupakan unsur pendukung kesekretariatan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Masyarakat selaku pengguna layanan yang diselenggarakan pemerintah daerah seyogyanya tidak hanya menjadi objek layanan tetapi juga menjadi aktor, bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan standar pelayanan disetiap unit pelayanan merupakan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

Sekretariat Daerah telah mendesain beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, mulai dari penerapan standarisasi pelayanan, pengukuran kinerja pelayanan serta evaluasi kinerja pelayanan publik disetiap perangkat daerah dan unit pelayanan

Terkait dengan program dan kegiatan yang terlampir tidak ada terdapat usulan Musrenbang terkait dengan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sebagaimana terlampir pada Tabel 2.5. Persandingan daftar kegiatan prioritas hasil musrenbang kecamatan tahun 2025 dengan Renja Perangkat Daerah.

TABEL 2.5
PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2025 DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

| HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2025 | | | | KEGIATAN SESUAI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| NO | KEGIATAN PRIORITAS | LOKASI (KELURAHAN) | INDIKATOR KINERJA | VOLUME | KEGIATAN RANCANGAN RENJA TAHUN 2025 | PAGU INDIKATIF TAHUN 2025 | CATATAN PENTING |
| | | | | | | | |
| | NIHIL | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

TABEL 2.6
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA PAYAKUMBUH

| NO | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|---------------------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | NIHIL | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**USULAN PROGRAM / KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
SUMBER DANA APBN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

| NO | PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS NASIONAL | OUT PUT (PROYEK) K/L | PROGRAM K/L | KEGIATAN K/L | TARGET | USULAN PAGU | LOKASI | | KET |
|----|---|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------|-------------|----------|----------|-----|
| | | | | | | | | PROVINSI | KAB/KOTA | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | NIHIL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dapat digambarkan Interkoneksi Prioritas Daerah Kota Payakumbuh dengan Prioritas Nasional sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Interkoneksi Prioritas Daerah Kota Payakumbuh dengan Prioritas Nasional

| No | Prioritas Nasional | Sasaran Nasional | Prioritas Kota Payakumbuh | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah | Target Kinerja 2025 |
|----|--|-------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| 1. | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Meningkatnya Pelayanan Publik | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel - Meningkatkan pelayanan publik yang prima | - Nilai Evaluasi AKIP Kota - Indek pengelolaan keuangan daerah - Indek SPBE - Indek kepuasan masyarakat | A (81) 78 3,19 89,80 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya keselarasan antara Prioritas Nasional dengan Prioritas Kota Payakumbuh, dimana Sasaran Nasional yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan

penyelundupan.diturunkan menjadi prioritas Kota Payakumbuh yakni Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas. Khusus Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh hanya mengampu indikator sasaran “Indek Kepuasan Masyarakat”yang dicantumkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuhsedangkan indikator kinerja lainnya menjadi Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan sebagai turunan visi dan misi Sekretariat Daerah yang terkait erat dengan tugas yaitu:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

Sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang rinci yang harus dipenuhi dalam waktu satu tahun sehingga dapat menjamin keberhasilan rencana jangka menengah dan jangka panjang.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penerapan regulasi baru dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Maka untuk tahun anggaran 2024, Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2024 tertuang dalam 3 (tiga) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 60 (enam puluh) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrai Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrai Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrai Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
 - f. Fasilitasi kunjungan tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
11. Penataan Organisasi
- a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- a. Fasilitasi Keprotokolan
 - b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- II. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Kegiatan :
1. Administrasi dan Tata Pemerintahan
 - a. Penataan Administrasi Pemerintahan;
 - b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
 2. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum;
 - c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
 4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - a. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
 - b. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

III. Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - a. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH

| NO | Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2026 | |
|----------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Urusan Pendukung | | | | 31.708.482.737 | | | | 22.266.760.938 |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Nilai IKM | | 88,60 | 27.393.538.487 | DAU | | 88,80 | 19.421.761.148 |
| | | Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat | | A | | | | A | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian kinerja program/ kegiatan | | 100% | 99.394.050 | DAU | | 100% | 123.000.000 |
| | | IKM Sekretariat Daerah | | 89 | | | | 90 | |
| 1) | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 4 dokumen | 16.812.300 | | | 4 dokumen | 53.000.000 |
| 2) | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 4 laporan | 82.581.750 | | | 4 laporan | 70.000.000 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | | 90% | 11.157.319.696 | DAU | | 95% | 9.315.910.801 |
| 1) | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 78 orang/bulan | 10.607.197.096 | | | 84 orang/bulan | 8.755.910.801 |
| 2) | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | | 12 dokumen | 550.122.600 | | | 12 dokumen | 560.000.000 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | | 100% | 50.000.000 | DAU | | 100% | 50.000.000 |
| 1) | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | 1 dokumen | 50.000.000 | | | 1 dokumen | 50.000.000 |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | | 100% | 71.000.000 | DAU | | 100% | 100.000 |

| NO | Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2026 | |
|----------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1) | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | 82 paket | 71.000.000 | | | 84 paket | 100.000 |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar | | 100% | 2.797.540.200 | DAU | | 100% | 1.185.814.950 |
| 1) | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | 9 paket | 34.985.000 | | | 9 paket | 20.000.000 |
| 2) | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan | | 5 paket | 99.996.000 | | | 5 paket | 25.000.000 |
| 3) | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | | 20 paket | 69.743.000 | | | 20 paket | 30.000.000 |
| 4) | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | | 3 paket | 39.448.050 | | | 3 paket | 60.714.950 |
| 5) | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | 3 dokumen | 424.123.150 | | | 3 dokumen | 100.000 |
| 6) | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 1 laporan | 889.697.000 | | | 1 laporan | 400.000.000 |
| 7) | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 144 laporan | 1.239.548.000 | | | 144 laporan | 650.000.000 |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor | | 90% | 3.394.721.963 | DAU | | 90% | 40.400.000 |
| 1) | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | 2 unit | 1.600.000.000 | | | 2 unit | 100.000 |
| 2) | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | 3 unit | 1.350.000.000 | | | 3 unit | 100.000 |

| NO | Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2026 | |
|----------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3) | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang diadakan | | 6 paket | 199.835.675 | | | 6 paket | 100.000 |
| 4) | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | 2 unit | 44.898.000 | | | 2 unit | 39.900.000 |
| 5) | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Disediakan | | 4 unit | 99.998.388 | | | 4 unit | 100.000 |
| 6) | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | 4 unit | 99.989.900 | | | 4 unit | 100.000 |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan | | 100% | 2.965.786.014 | DAU | | 100% | 3.150.000.000 |
| 1) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 1 laporan | 941.039.294 | | | 1 laporan | 900.000.000 |
| 2) | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 1 laporan | 391.790.000 | | | 1 laporan | 150.000.000 |
| 3) | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan | | 1 laporan | 1.632.956.720 | | | 1 laporan | 2.100.000.000 |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | | 90% | 1.739.949.100 | DAU | | 90% | 1.379.050.000 |
| 1) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | 15 unit | 612.180.000 | | | 15 unit | 601.400.000 |

| NO | Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2026 | |
|----------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 45 unit | 754.140.000 | | | 45 unit | 397.650.000 |
| 3) | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | 10 unit | 9.977.500 | | | 10 unit | 40.000.000 |
| 4) | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | 10 unit | 12.210.000 | | | 10 unit | 15.000.000 |
| 5) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 4 unit | 233.721.600 | | | 4 unit | 200.000.000 |
| 6) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 4 unit | 25.000.000 | | | 4 unit | 25.000.000 |
| 7) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 4 unit | 92.720.000 | | | 4 unit | 100.000.000 |
| 8 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH | | 100% | 1.456.024.664 | DAU | | 100% | 637.469.807 |
| 1) | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 2 orang/bulan | 984.905.144 | | | 2 orang/bulan | 182.469.807 |
| 2) | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | 5 paket | 66.119.520 | | | 5 paket | 50.000.000 |
| 3) | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 4 orang | 5.000.000 | | | 4 orang | 5.000.000 |

| NO | Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2026 | |
|-----------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4) | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 2 orang/bulan | 400.000.000 | | | 2 orang/bulan | 400.000.000 |
| 9 | Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah | Persentase pelayanan kerumahtangaan Sekretariat Daerah dengan baik | | 100% | 892.437.700 | DAU | | 100% | 673.517.120 |
| 1) | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | 15 paket | 476.300.500 | | | 15 paket | 400.000.000 |
| 2) | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | 15 paket | 321.242.000 | | | 15 paket | 200.000.000 |
| 3) | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | | 15 paket | 94.895.200 | | | 15 paket | 73.517.120 |
| 10 | Penataan Organisasi | Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah | | 39,09% | 173.853.150 | DAU | | 39,09% | 486.498.470 |
| 1) | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | 1 dokumen | 74.300.700 | | | 1 dokumen | 166.537.490 |
| 2) | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | 1 laporan | 60.449.700 | | | 1 laporan | 180.000.000 |
| 3) | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | 2 dokumen | 39.102.750 | | | 2 dokumen | 139.960.980 |
| 11 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik | | 100% | 2.595.511.950 | DAU | | 100% | 2.380.000.000 |
| 1) | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | 12 laporan | 99.980.050 | | | 12 laporan | 140.000.000 |
| 2) | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | 12 laporan | 2.171.064.900 | | | 12 laporan | 2.000.000.000 |
| 3) | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | 12 laporan | 324.467.000 | | | 12 laporan | 240.000.000 |

| NO | Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2026 | |
|----|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Nilai LPPD | | 3.190 | 3.987.838.900 | | | 3,200 | 2.194.999.820 |
| | | Indeks Reformasi Hukum | | 74 | | | | 75 | |
| 1 | Administrasi Tata Pemerintahan | Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik | | 100% | 628.547.350 | DAU | | 100% | 740.000.000 |
| | | Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu | | 100% | | | | 100% | |
| 1) | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | | 1 dokumen | 232.352.000 | | | 1 dokumen | 280.000.000 |
| 2) | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | 1 dokumen | 63.888.750 | | | 1 dokumen | 180.000.000 |
| 3) | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | 5 dokumen | 332.306.600 | | | 5 dokumen | 280.000.000 |
| 2 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat | | 100% | 2.958.960.150 | DAU | | 100% | 660.000.000 |
| 1) | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | 1 dokumen | 559.138.450 | | | 1 dokumen | 220.000.000 |
| 2) | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | | 1 dokumen | 1.962.037.700 | | | 1 dokumen | 120.000.000 |

| NO | Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2026 | |
|------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3) | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | | 1 dokumen | 437.784.000 | | | 1 dokumen | 320.000.000 |
| 3 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi | | 100% | 387.432.000 | DAU | | 100% | 509.999.820 |
| | | Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi | | 100% | | | | 100% | |
| 1) | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | | 3 dokumen | 113.766.000 | | | 3 dokumen | 99.999.820 |
| 2) | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | | 2 kasus | 265.688.000 | | | 2 kasus | 360.000.000 |
| 3) | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah produk hukum dan pengelolaan produk hukum yang didokumentasikan | | 3 dokumen | 7.978.000 | | | 3 dokumen | 50.000.000 |
| 4 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi | | 5 MoU/PKS | 12.899.400 | DAU | | 5 MoU/PKS | 285.000.000 |
| 1) | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | 1 dokumen | 9.946.000 | | | 1 dokumen | 165.000.000 |
| 2) | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | 1 laporan | 2.953.400 | | | 1 laporan | 120.000.000 |
| III | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | | 77 | 327.105.350 | | | 78 | 649.999.970 |
| 1 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti | | 100% | 97.032.150 | DAU | | 100% | 150.000.000 |

| NO | Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2026 | |
|----------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1) | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | 1 dokumen | 32.499.000 | | | 1 dokumen | 70.000.000 |
| 2) | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | 1 laporan | 64.533.150 | | | 1 laporan | 80.000.000 |
| 2 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti | | 100% | 18.603.350 | DAU | | 100% | 40.000.000 |
| 1) | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | 12 laporan | 18.603.350 | | | 12 laporan | 40.000.000 |
| 3 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik | | 100% | 198.616.750 | DAU | | 100% | 450.000.000 |
| | | Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan | | 4 kali | | | | 4 kali | |
| 1) | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | 1 dokumen | 26.245.900 | | | 1 dokumen | 220.000.000 |
| 2) | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | 1 dokumen | 150.888.000 | | | 1 dokumen | 160.000.000 |
| 3) | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | 40 orang | 21.482.850 | | | 40 orang | 70.000.000 |
| 4 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun | | 1 dokumen | 12.853.100 | DAU | | 1 dokumen | 9.999.970 |

| NO | Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2026 | |
|----|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1) | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | | 1 dokumen | 12.853.100 | | | 1 dokumen | 9.999.970 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 terdiri dari beberapa 3 (tiga) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 60 (enam puluh) Sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 31.708.482.737,- yang mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah tahun 2025. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2025 diuraikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 31.708.482.737,00 | | | | | | | | 22.545.860.938,00 | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 31.708.482.737,00 | | | | | | | | 22.545.860.938,00 | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 31.708.482.737,00 | | | | | | | | 22.545.860.938,00 | |
| 1. | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Nilai IKM Sekretariat Daerah Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat</i> | - | | | 88,60 Indeks A Kategori | 27.393.538.487,00 | | | | | | - | 19.418.861.148,00 | | |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>IKM Sekretariat Daerah Persentase capaian kinerja program/ kegiatan</i> | - | | | 89 nilai 100 % | 99.394.050,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 120.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | | | | 4 Dokumen | 16.812.300,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | 4 Laporan | 82.581.750,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan</i> | - | | | 90 % | 11.157.319.696,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 9.315.910.801,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | | | | 78 Orang/bulan | 10.607.197.096,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 8.755.910.801,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> | | | | 12 Dokumen | 550.122.600,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 560.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik</i> | - | | | 100 % | 50.000.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i> | | | | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</i> | - | | | 100 % | 71.000.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> | | | | 71 Paket | 71.000.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar</i> | - | | | 100 % | 2.797.540.200,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 1.185.814.950,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 9 Paket | 34.985.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 20.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 5 Paket | 99.996.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 20 Paket | 69.743.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 30.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 3 Paket | 39.448.050,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 60.714.950,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | | | | 3 Dokumen | 424.123.150,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i> | | | | 12 Laporan | 889.697.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 144 Laporan | 1.239.548.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 650.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor</i> | - | | | 90 % | 3.394.721.963,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 40.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> | | | | 2 Unit | 1.600.000.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i> | | | | 3 Unit | 1.350.000.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | | | | 6 Unit | 199.835.675,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 2 Unit | 44.898.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 4 Unit | 99.998.388,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | | | | 4 Unit | 99.989.900,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan</i> | - | | | 100 % | 2.965.786.014,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 3.150.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 1 Laporan | 941.039.294,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 900.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 391.790.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 1.632.956.720,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 2.100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</i> | - | | | 90 % | 1.739.949.100,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 1.379.050.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | | | | 15 Unit | 612.180.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 601.400.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 45 Unit | 754.140.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 397.650.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i> | | | | 10 Unit | 9.977.500,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 10 Unit | 12.210.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 4 Unit | 233.721.600,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 4 Unit | 25.000.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 25.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 4 Unit | 92.720.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | <i>Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH</i> | - | | | 100 % | 1.456.024.664,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 637.469.807,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> | | | | 2 Orang/Bulan | 984.905.144,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 182.469.807,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i> | | | | 5 Paket | 66.119.520,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> | | | | 4 Orang | 5.000.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 5.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> | | | | 2 Orang/Bulan | 400.000.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah | <i>Persentase pelayanan kerumahaan Sekretariat Daerah dengan baik</i> | - | | | 100 % | 892.437.700,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 673.517.120,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i> | | | | 15 Paket | 476.300.500,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 400.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i> | | | | 15 Paket | 321.242.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i> | | | | 15 Paket | 94.895.200,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 73.517.120,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | <i>Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah</i> | - | | | 39.09 % | 173.853.150,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 486.498.470,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i> | | | | 1 Dokumen | 74.300.700,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 166.537.490,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i> | | | | 1 Laporan | 60.449.700,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 180.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i> | | | | 2 Dokumen | 39.102.750,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 139.960.980,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | <i>Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik</i> | - | | | 100 % | 2.595.511.950,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 2.380.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i> | | | | 12 Laporan | 99.980.050,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 140.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i> | | | | 12 Laporan | 2.171.064.900,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 2.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i> | | | | 12 Laporan | 324.467.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 240.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | <i>Nilai LPPD indeks reformasi hukum</i> | - | | | 3,1900 Nilai 74,00 Indeks | 3.987.838.900,00 | | | | | | - | 2.476.999.820,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | <i>Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu</i> | - | | | 100 % 100 % | 628.547.350,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 1.200.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i> | | | | 1 Dokumen | 232.352.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 740.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i> | | | | 1 Dokumen | 63.888.750,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 180.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i> | | | | 5 Dokumen | 332.306.600,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 280.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | <i>Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat</i> | - | | | 100 % | 2.958.960.150,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 660.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i> | | | | 1 Dokumen | 559.138.450,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 220.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB</i> | | | | 1 Dokumen | 1.962.037.700,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 120.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i> | | | | 1 Dokumen | 437.784.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 320.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | <i>Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi</i> | - | | | 100 % 100 % | 387.432.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 509.999.820,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i> | | | | 3 Dokumen | 113.766.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 99.999.820,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i> | | | | 2 Kasus | 265.688.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 360.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i> | | | | 3 Dokumen | 7.978.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | <i>Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi</i> | - | | | 5 MoU/PKS | 12.899.400,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 107.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i> | | | | 1 Dokumen | 9.946.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 100.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</i> | | | | 1 Laporan | 2.953.400,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 7.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 3. | 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | <i>Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa</i> | - | | | 77 Indeks | 327.105.350,00 | | | | | | - | 649.999.970,00 | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | <i>Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti</i> | - | | | 100 % | 97.032.150,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i> | | | | 1 Dokumen | 32.499.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i> | | | | 1 Laporan | 64.533.150,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 80.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | <i>Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti</i> | - | | | 100 % | 18.603.350,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i> | | | | 12 Laporan | 18.603.350,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 40.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | <i>Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik</i> | - | | | 4 kali 100 % | 198.616.750,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 450.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i> | | | | 1 Dokumen | 26.245.900,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 220.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i> | | | | 1 Dokumen | 150.888.000,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 160.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i> | | | | 40 Orang | 21.482.850,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 70.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|---------------|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2025 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun | - | | | 1 dokumen | 12.853.100,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | - | 9.999.970,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | | | | 1 Dokumen | 12.853.100,00 | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | | 9.999.970,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| JUMLAH | | | | | | | | 31.708.482.737,00 | | | | | | 22.545.860.938,00 | | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025, merupakan dokumen rencana operasional pembangunan di Tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2025. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 baik dalam lingkup program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggungjawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh kedepannya.

Payakumbuh, 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



Drs. RIDA ANANDA, M.Si
NIP. 19680607 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jln. Veteran No. 70, Eks Lap. Poliko. Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN : 2025
ANGGARAN

| | |
|---------------------|--|
| PROGRAM | Program Perekonomian dan Pembangunan |
| KEGIATAN | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
| SUB KEGIATAN | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |
| KODE PROGRAM | 4.01.03. |

**ANALISIS
SITUASI**

1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) merupakan transformasi kelembagaan menjelaskan bahwa UKPBJ Barang/ Jasa agar mampu melaksanakan proses Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/ Jasa.

Pembinaan yang dilakukan dititikberatkan kepada sumber daya manusia di UKPBJ maupun Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa baik di Perangkat Daerah Kota Payakumbuh maupun Penyedia Barang/ Jasa. Pemerintah Kota Payakumbuh harus bisa mengantisipasi munculnya isu-isu yang berkaitan dengan perbedaan gender dalam hal keikutsertaan/partisipasi dalam proses pembangunan dan berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban sesuai proporsi untuk mendapatkan masukan atau pengalaman pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

**2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
Faktor Kesenjangan**

Sumber daya laki-laki lebih diutamakan untuk dapat terlibat langsung dalam proses pengadaan barang/jasa dibandingkan sumber daya perempuan

Penyebab Internal

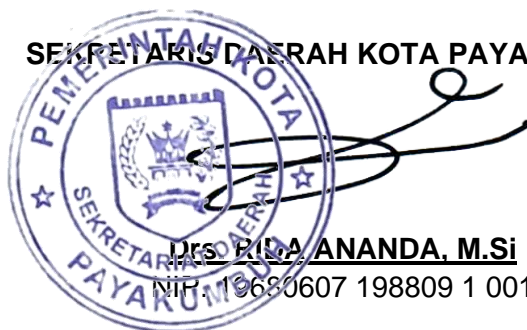
1. Belum pahamnya konsep Gender pada rekanan/penyedia;
2. Adanya kesenjangan SDM, laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan strategis pada perusahaan- perusahaan.

Penyebab Eksternal

1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa gender adalah hanya sebatas mendahulukan perempuan saja;
2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang strategis seperti menjadi kepala keluarga,

| | | |
|------------------------|---|--|
| | <p>pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, dll</p> <p>3. Hasil konstruksi sosial budaya yang membedakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu</p> | |
| CAPAIAN PROGRAM | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | |
| JUMLAH ANGGARAN | Rp. 21.482.850,- | |
| RENCANA AKSI | Sub Kegiatan | Melaksanakan Pelatihan/ Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa kepada seluruh pengguna dan penyedia barang/jasa di Kota Payakumbuh tanpa membedakan gender |
| | | Masukan Rp. 21.482.850,- |
| | | Keluaran 1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; 2. Keikutsertaan kaum perempuan dalam Pelaksanaan Pelatihan/ Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa bagi pengguna/ Penyedia Barang/ Jasa |
| | | Hasil 1. Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik; 2. Meningkatnya keikutsertaan dan pemahaman kaum perempuan dalam proses pengadaan barang/ jasa serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan. |

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



Drs. RISA ANANDA, M.Si

NIP. 19650607 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jln. Veteran No. 70, Eks Lap. Poliko. Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

| KOLOM 1 | KOLOM 2 | KOLOM 3 | KOLOM 4 | KOLOM 5 | KOLOM 6 | KOLOM 7 | KOLOM 8 | KOLOM 9 |
|--|--|---|--|--|--|--|---|--|
| Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan | Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) | Isu Gender | | | Kebijakan Dan Rencana Aksi | | Pengukuran Hasil | |
| | | Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line | Target Kinerja/Indikator Gender |
| <p>Program : Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>Kegiatan: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Tujuan : Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa</p> | <p>Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) merupakan transformasi kelembagaan menjelaskan bahwa UKPBJ Barang/ Jasa agar mampu melaksanakan proses Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/ Jasa.</p> <p>Pembinaan yang dilakukan dititikberatkan kepada sumber daya manusia di UKPBJ maupun Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa baik di Perangkat Daerah Kota Payakumbuh maupun Penyedia Barang/ Jasa. Pemerintah Kota Payakumbuh harus bisa mengantisipasi munculnya isu-isu yang berkaitan dengan perbedaan gender dalam hal keikutsertaan/partisipasi dalam proses pembangunan dan berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban sesuai proporsi untuk mendapatkan masukan atau pengalaman pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah.</p> | <p>Sumber daya laki-laki lebih diutamakan untuk dapat terlibat langsung dalam proses pengadaan barang/jasa dibandingkan sumber daya perempuan</p> | <p>1. Belum pahamnya konsep Gender pada rekanan/penyedia 2. Adanya kesenjangan SDM, laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan strategis pada perusahaan-perusahaan</p> | <p>1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa gender adalah hanya sebatas mendahulukan perempuan saja; 2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang strategis seperti menjadi kepala keluarga, pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, dll 3. Hasil konstruksi sosial budaya yang membedakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu</p> | <p>Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa</p> | <p>Melaksanakan sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa kepada seluruh pengguna dan penyedia barang/jasa di Kota Payakumbuh tanpa membedakan gender</p> | <p>input: Rp. 21.482.850,-</p> <p>output: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>outcomes: Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik;</p> | <p>input: <i>Peserta Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa</i></p> <p>output: Keikutsertaan kaum perempuan dalam Pelaksanaan Pelatihan/ Sosialisasi Pengadaan Barang/ Jasa bagi pengguna/ Penyedia Barang/ Jasa</p> <p>outcomes: Meningkatnya keikutsertaan dan pemahaman kaum perempuan dalam proses pengadaan barang/ jasa serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan</p> |

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH


Drs. RIDA ANANDA, M.Si
NIP. 19680607 198809 1 001

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025**

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET |
|-----------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan | 1. Nilai LPPD | 3,1900 |
| | | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat | 88,60 |
| | | 3. Indeks Pelayanan Publik | 4,28 |

Payakumbuh, 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



Drs. RDA ANANDA, M.Si

NIP. 19680607 198809 1 001

